

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketenagakerjaan mempunyai aturan agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha yang secara langsung meningkatkan perekonomian nasional. Potensi ketenagakerjaan yang besar menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pentingnya informasi ketenagakerjaan bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyatakan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan, menurut BPS tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja, yaitu penduduk usia

15-64 tahun. Jadi, tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat.

Tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi, karena tenaga kerja akan menghasilkan produk yang dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak maka akan tercipta pasar tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri sangat dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh tenaga kerja itu sendiri, dan penawaran tenaga kerja ditentukan oleh para pengusaha. Tenaga kerja mencakup dua hal penting yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk, baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif (15-64 tahun) yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Angkatan kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

2. Tidak Bekerja atau Penganggur

Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia sepuluh tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan kegiatan yang tidak termasuk kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. (Harnida, *et.al.* 2015:3-4)

2.1.2 Pengangguran

2.1.2.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran memiliki beberapa definisi yaitu :

1. BPS (Harnida, *et.al.* 2015:22) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum bekerja.
2. Sadono Sukirno (2016:13), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menyimpulkan pengangguran adalah keadaan penduduk yang tergolong angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak memiliki usaha tetap.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pengangguran

1. Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan akibat penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional diakibatkan adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kesulitan penyesuaian tidak hanya terletak pada bentuk waktu yang dibutuhkan, tetapi juga pada prosedur pelamaran dan proses seleksi. Pengangguran tersebut juga dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas bagi pencari kerja, dan lokasi lowongan kerja tersebut tidak sesuai untuk pencari kerja. Oleh karena itu, pengangguran friksional mengacu pada pengangguran yang terutama disebabkan oleh proses mencari pekerjaan. Pengangguran friksional dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- Setiap tahun, banyak sekali tenaga kerja yang mencari pekerjaan, dan para pencari kerja ini mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Misalnya lulusan sarjana yang menyelesaikan pendidikannya akan langsung mencari informasi lowongan pekerjaan.
- Perusahaan ditinggalkan oleh para pekerja. Kegiatan perekonomian yang tinggi, terkadang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan menghadapi masalah seperti terjadinya krisis ekonomi atau pangsa pasar yang tidak normal, sehingga pekerja dapat meninggalkan pekerjaannya untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai. Selain itu, pekerja meninggalkan pekerjaan lama mereka untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.

- Banyaknya para pekerja yang memasuki pasaran buruh. Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya karena suatu alasan, tetapi nanti mereka akan kembali ke pekerjaannya.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Perubahan struktural ini membutuhkan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pencari kerja tidak dapat beradaptasi dengan keterampilan baru ini. Pada dasarnya ada tiga hal yang mempengaruhi pengangguran struktural, yaitu mobilitas tenaga kerja, kecepatan perubahan struktural, dan aspek regional dari adanya struktural yang berubah tersebut.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi, yaitu permintaan agregat terkadang tinggi, ini mendorong pengusaha menaikkan produksi yang dimana lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat terkadang turun. Ketika permintaan menurun maka akan menyebabkan perusahaan menurunkan permintaan tenaga kerja. Jadi beberapa dari mereka akan di PHK, maka pengangguran bertambah.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi mengacu pada pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan mesin, sehingga manusia tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi. (Sukirno, 2016:328-329)

2. Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah pengangguran karena jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang benar-benar belum tertampung di sektor ekonomi. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja, mereka yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi yang belum pernah bekerja atau yang sudah pernah bekerja), atau mereka yang sedang bersiap untuk memulai usaha, mereka yang tidak bekerja merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai untuk bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang disebabkan kelebihan *supply* tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, sehingga terdapat pengangguran tidak kentara karena kelebihan tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja ini jika dialihkan dari sektor yang satu ke sektor yang lainnya maka tidak mengurangi produksi, jadi standar upah jauh di bawah standar normal. Mereka kelihatannya bekerja tetapi upah yang mereka peroleh tidak

cukup untuk menghidupi kebutuhan dasar keluarganya. Pengangguran tersembunyi juga dapat terjadi, karena pekerjaan tersebut bukan bakat dan kemampuannya, sehingga pekerjaan akhirnya menjadi tidak optimal.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan akibat adanya perubahan musim. Pengangguran ini sering terjadi di sektor pertanian, pada musim hujan petani sering bekerja di sawah, sebaliknya pada musim kemarau atau terik matahari banyak petani yang tidak bekerja atau menganggur menunggu musim berikutnya. Pada saat mereka menunggu musim kemarau terlewati, para petani tersebut digolongkan sebagai pengangguran musiman.

d. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur pun sama, yaitu aktivitas tenaga kerja tidak maksimal karena tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Setengah menganggur juga bisa disebabkan oleh tidak terpenuhinya jam kerja dalam seminggu, misalnya pekerja hanya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. (Nano Prawoto, 2019:89-91)

2.1.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Harnida, *et.al.* (2015:22) menyatakan bahwa pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan (baik mereka yang belum bekerja maupun sudah pernah bekerja), sedang mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja.

Pengangguran terbuka disebabkan kesempatan kerja yang tersedia lebih rendah daripada jumlah angkatan kerja.

Menurut Edgar Adwards (dalam Sumarsono, 2009), pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur secara sukarela atau karena terpaksa benar-benar menolak bekerja. Mengingat bahwa pengangguran terbuka mencakup semua pekerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan, baik untuk pertama kali mencari pekerjaan baru maupun pekerjaan setelah pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini memungkinkan tingkat pengangguran terbuka dapat lebih menjelaskan jumlah pengangguran yang terjadi.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS). Sehingga dalam perhitungannya, yaitu :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap pasar kerja. Contoh: Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8%, artinya 8 dari 100 orang berusia 15 tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) menganggur.

2.1.2.4 Efek Buruk Pengangguran

Sadono Sukirno (2012:514) menyatakan akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek, dimana dua aspek tersebut yaitu :

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.
3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

b. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

3. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut :

1. Sadono Sukirno, (2016:9) mendefinisikan bahwa “Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”.
2. Nano Prawoto (2019:163-164) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi jangka panjang, hal ini menyangkut tentang kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam dan proses terjadinya output sehingga menjadi pendapatan bagi masyarakat. Proses yang terjadi dalam aktivitas ekonomi akan berlangsung secara terus-menerus. Proses tersebut akan menghasilkan pertambahan pada jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan pertambahan produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam analisis makroekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan atau pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.”
3. Menurut Kuznet (dalam Todaro, 2003:99) definisi dari “Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya”. Kenaikan

kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Suatu perekonomian dikatakan akan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari yang dicapai dimasa sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus berlanjut meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi akan selalu meningkat dalam jumlah dan kualitas.

2.1.3.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi banyak terdapat teori pertumbuhan ekonomi. Teori-teori tersebut berkenaan dengan dinamika dalam pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh pemikir dari aliran teori pertumbuhan ekonomi klasik oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus, Teori Schumpeter teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar (pendekatan Neo-Keynes), dan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan (pendekatan Neo-Klasik).

2.1.3.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik (Sukirno, 2016:433), terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

1. Pandangan Adam Smith

Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangannya yaitu :

- a. Peranan sistem pasar bebas, Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.
- b. Perluasan pasar perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung.
- c. Spesialisasi dan kemajuan teknologi, perluasan pasar dan perluasan ekonomi yang digalakkannya, akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran.

2. Pandangan Malthus dan David Ricardo

Tidak semua ahli ekonomi Klasik mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke

tingkat subsisten. Jumlah penduduk atau tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, penambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka, penambahan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti penambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsisten.

2.1.3.2.2 Teori Schumpeter

Teori Schumpeter (dalam Sadono Sukirno, 2016:434) menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari teori ini bahwa pengusaha merupakan kelompok yang akan terus melakukan *reformasi* atau inovasi dalam kegiatan perekonomian. Inovasi tersebut antara lain: memperkenalkan produk baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan produk tertentu, memperluas pasar produk tertentu ke pasar baru, mengembangkan sumber bahan baku baru, dan mengubah organisasi dengan meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan. Kegiatan inovatif ini akan membutuhkan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan

meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.

2.1.3.2.3 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynesian tentang kegiatan ekonomi nasional dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menunjukkan hubungan diantara analisis keynes dengan teori Harrod-Domar. Teori Keynes pada hakikatnya menentukan dan menerangkan bahwa perbelanjaan agregat akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Dikembangkan oleh Keynes menunjukkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Analisis Harrod-Domar bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya teori Harrod-Domar dianalisis keadaan agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Sebagai jawaban tersebut menurut Harrod-Domar agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu.

2.1.3.2.4 Teori Pertumbuhan Solow–Swan

Arsyad (2010:88) teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi. Ekonom pertama yang mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Thevor Swan. Teori pertumbuhan neoklasik dapat dikemukakan dalam bentuk fungsi produksi *Cobb-Douglass*, dimana output merupakan fungsi tenaga kerja dan modal. Pada saat yang sama, tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Swan adalah skala pengembalian yang konstan (*constan returns to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya.

Fungsi produksi *Cobb-Douglass* dapat ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Dimana :

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = skor barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Teori-teori di atas menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk modal dan tenaga kerja sebagai faktor penting penentu pertumbuhan. Pembentukan modal dapat meningkatkan kemampuan perekonomian untuk

menghasilkan barang dan jasa, dan akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. Namun dalam menjamin pertumbuhan jangka panjang, peran teknologi juga menjadi hal penting.

2.1.3.3 Produk Domestik Bruto (PDB)

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau nilai total produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto juga dapat menunjukkan bagaimana barang dan jasa digunakan, baik untuk konsumsi, ekspor, atau disimpan dalam inventori untuk dijual pada periode mendatang. Melalui Produk Domestik Bruto dapat digambarkan struktur, tingkat, dan laju pertumbuhan perekonomian di suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Selain itu, Produk Domestik Bruto merupakan indikator ekonomi yang banyak digunakan sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Produk Domestik Bruto juga merupakan alat untuk membantu semua pihak

memahami dan mengelola perekonomian. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memajukan bidang ekonomi.

2.1.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan.

1. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.

Perhitungan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Hal ini disebabkan apa yang diproduksi oleh suatu ekonomi sama dengan apa yang digunakan dalam perekonomian tersebut.

2.1.3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-t terhadap nilai pada tahun ke t-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

2.1.4 Upah Minimum

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30, menyatakan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Jadi, upah merupakan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang diberikan oleh pemilik perusahaan.

Upah memiliki titik minimum atau biasa disebut upah minimum. Menurut Harnida, *et. al.* (2015:9) menyatakan bahwa upah minimum merupakan kebijakan pemerintah agar pekerja memperoleh upah sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan hidup layak. Pengaturan pengupahan ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau serikat pekerja. Upah yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang berlaku. Pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pasal 41, menyatakan “Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap maupun upah tanpa tunjangan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 89 ayat (1) dijelaskan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pada setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota, besaran upah yang diberikan oleh perusahaan berbeda-beda tergantung dari masing-masing daerah tersebut.

2.1.4.2 Fungsi Upah

Menurut Mochtar Halim (2000:24), fungsi upah bervariasi tergantung dari perspektif upah itu dilihat, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- a. Dari perspektif tenaga kerja, upah diperlukan untuk kehidupan yang layak bersama anggota keluarga;
- b. Dari perspektif pemberi kerja, upah merupakan faktor pendorong dalam proses produksi dan biaya produksi perusahaan;
- c. Dari perspektif pemerintah, upah adalah tolak ukur hidup masyarakat. Oleh karena itu, penetapan pengupahan harus mampu menciptakan suasana bisnis yang harmonis, serasi, mantap, tentram dan dinamis.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) dan (2) tentang Pengupahan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

2.1.4.3 Tujuan Pemberian Upah

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tujuan dari pemberian upah minimum adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan proteksi untuk sejumlah pekerja berupah rendah yang dipertimbangkan yang posisinya mudah kena tekanan dalam pasar tenaga kerja.
- b. Untuk memastikan pembayaran upah-upah yang adil.
- c. Menyediakan suatu dasar bagi struktur upah dan mengurangi kemiskinan dengan net keamanan sebagai proteksi upah yang terlalu rendah.
- d. Melayani sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro untuk mencapai tujuan nasional seperti stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan. (Wirawan, 2015:394)

2.1.4.4 Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89 dapat dipahami bahwa upah minimum ditentukan setiap tahun sebagai jaring pengaman atau *safety net* untuk mencapai Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur. Jadi, Upah Minimum Provinsi dalam setiap daerah provinsi, upah yang diberikan dari perusahaan berbeda-beda tergantung dari masing-masing daerah tersebut. Besaran UMP ditentukan oleh gubernur masing-masing provinsi, karena kebutuhan hidup di setiap provinsi berbeda-beda.

Menurut Ridwan Halim (2001:84) menjelaskan bahwa dalam menentukan upah untuk tenaga kerja, biasanya pemberi kerja memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja dapat diukur dari kontribusi fisik, mental dan sosial dari waktu, tenaga dan keterampilan yang digunakan;
- b. Melihat dan melakukan survei dengan perusahaan serupa untuk memahami upah yang dibayarkan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama;
- c. Pemberian insentif kepada tenaga kerja yang rajin dan berprestasi istimewa sehingga dapat menaikkan produktivitas.

Selain itu, faktor-faktor yang penting menjadi sumber dari perbedaan upah antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara golongan pekerjaan adalah :

- a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan;
- b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan;
- c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan;
- d. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan;
- e. Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja.

2.1.5 Inflasi

2.1.5.1 Pengertian Inflasi

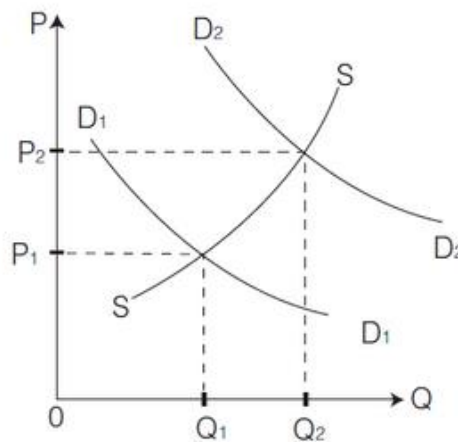
Menurut Mankiw (dalam Nano, 2019:76), “Inflasi dapat diartikan gejala peningkatan harga barang-barang secara terus menerus dalam waktu yang panjang yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa atau pada periode tertentu nilai uang menurun”. Maka inflasi ini merupakan kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat di negara tersebut. Sehingga suatu negara dengan negara lainnya dalam perhitungan inflasi bisa mempunyai macam barang yang berbeda. Oleh karena itu, menurut BPS inflasi juga diartikan sebagai penurunan keseluruhan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi terbagi menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan (*demand full inflation*) dan inflasi dorongan penawaran (*cost push inflation*).

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Full Inflation*)

Inflasi yang disebabkan adanya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat yang terus meningkat dengan tajam sehingga mengakibatkan tingkat harga secara umum naik.



Gambar 2.1

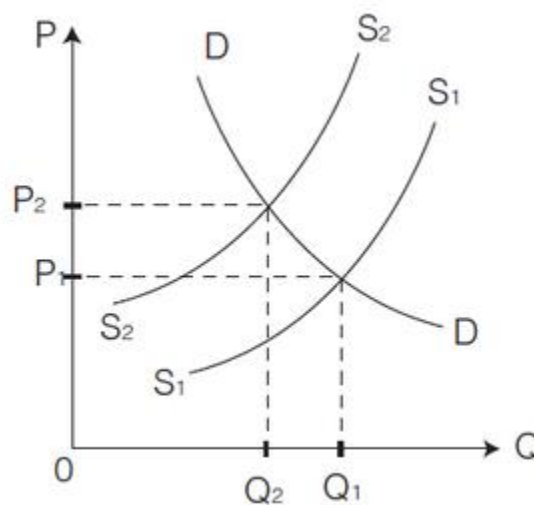
Kurva Demand Full Inflation

Sumber : Nano Prawoto (2019:78)

Sehubungan dengan kurva Gambar 2.1, diasumsikan bahwa perekonomian menunjukkan adanya perpotongan antara kurva permintaan D_1 dan kurva penawaran (S) dengan tingkat harga P_1 dan tingkat *output* riil. Kemudian terjadi pergeseran kurva, kurva permintaan bergeser ke kanan D_1 ke D_2 , pergerakan diakibatkan adanya peningkatan permintaan sehingga menyebabkan pengeluaran yang berlebih terhadap permintaan barang atau jasa. Pergeseran kurva permintaan meningkatkan *output* riil (Q_1 ke Q_2) dan tingkat harga (P_1 ke P_2) yang diakibatkan pergeseran kurva permintaan dari bawah ke atas tingkat harga yang menyebabkan inflasi adalah arti dari *demand full inflation*. Contoh terjadi kenaikan permintaan barang bisa dikarenakan adanya kenaikan gaji/upah pegawai secara nasional, kondisi menjelang lebaran dan lainnya. (Nano Prawoto, 2019:78)

2. Inflasi Dorongan Penawaran (*Cost Push Inflation*)

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan penurunan jumlah produksi sehingga penawaran berkurang, jika penawaran berkurang dengan asumsi permintaan tidak berubah atau tetap maka harga akan naik. Jadi, inflasi ini akan berkaitan pada peningkatan harga-harga barang serta turunnya produksi.



Gambar 2.2

Kurva *Cost Push Inflation*

Sumber : Nano Prawoto, 2019:79

Berdasarkan kurva pada Gambar 2.2, dipaparkan jika kurva penawaran bergerak ke kiri (S_1 ke S_2) dan harga khusus mengalami peningkatan akan terjadi inflasi dorongan biaya. Naik turunnya harga dan output juga disebut “stagnansi inflasi”. (Nano Prawoto, 2019:79)

Disisi lain, penggolongan inflasi berdasarkan atas besarnya laju inflasi dibedakan menjadi tiga kategori, antara lain :

1. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*)

Inflasi yang disimbolkan dengan rendahnya laju inflasi yaitu kurang dari 10% per tahun. Dalam jangka waktu yang sama peningkatan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil.

2. Inflasi Menengah (*Gallopning Inflation*)

Terjadi jika adanya peningkatan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek yaitu antara 10% hingga 50% per tahun. Dampak yang diberikan yaitu jumlah uang yang minimum yang dipegang oleh masyarakat hanya dapat digunakan sebagai transaksi sehari-hari.

3. Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*)

Inflasi yang memberikan dampak negatif akibat peningkatan harga yang mencapai 5 atau 6 kali dari jumlah biasanya, konsumen rumah tangga tidak memiliki keinginan untuk menginvestasikan atau menyimpan uang. Hal tersebut terjadi jika pemerintah sedang mengalami defisit anggaran belanja dan ditunjukkan dengan laju inflasi lebih dari 50% per tahun. (Nano Prawoto, 2019:79-80)

Berdasarkan asal munculnya inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Domestic inflation merupakan inflasi yang timbul dari dalam negeri yang disebabkan :

- a. Meningkatnya permintaan masyarakat pada barang-barang di pasar, di sisi lain peningkatan penawaran atas barang itu tidak dapat diimbangi dengan laju permintaannya;
- b. Percetakan uang baru turut membiayai defisit anggaran belanja;
- c. Harga jual meningkat akibat adanya peningkatan biaya produksi barang dalam negeri.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Foreign Inflation*)

Foreign inflation adalah inflasi yang berasal dari mancanegara, yang mempunyai dampak, antara lain :

- a. Indeks Biaya Hidup (IBH) secara langsung mengalami peningkatan karena barang-barang tersebut tergolong barang-barang impor.
- b. Indeks harga secara tidak langsung mengalami peningkatan. Peningkatan diakibatkan oleh biaya ongkos produksi yang menggunakan bahan mentah atau teknologi, mesin mengalami peningkatan.
- c. Harga di dalam negeri secara tidak langsung mengalami peningkatan karena barang-barang impor yang masuk ke dalam negara. (Nano Prawoto, 2019:80)

2.1.5.3 Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak negatif dan positif, namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak negatif.

1. Dampak Positif Inflasi

Dampak positif inflasi mengarah pada peredaran dan perputaran barang lebih cepat dimasyarakat sehingga meningkatkan produksi barang dan meningkatkan keuntungan para pengusaha. Kesempatan kerja meningkat karena tambahan investasi yang tercipta berarti banyak lapangan kerja baru terbuka, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ketika inflasi terkendali dan diikuti dengan pendapatan nominal yang meningkat, maka pendapatan riil masyarakat juga meningkat.

2. Dampak Negatif Inflasi

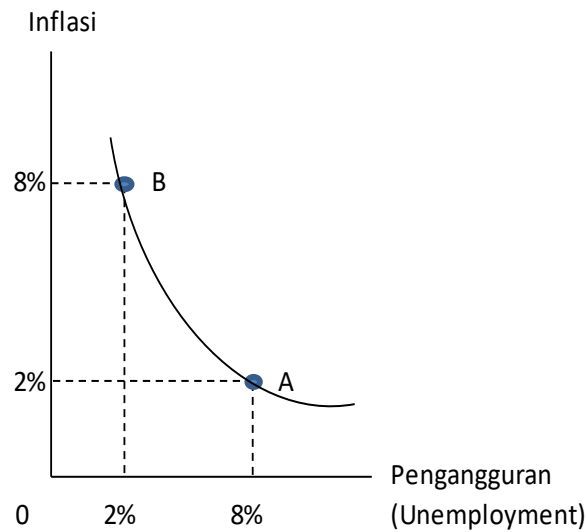
Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Dalam jangka panjang kenaikan inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam negeri. Produksi barang menjadi berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksinya. Produksi yang berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya, sehingga pengangguran meningkat.

Selain dampak inflasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masih ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya dan berkaitan dengan bidang perekonomian, yaitu :

1. Dampak Inflasi terhadap Pengangguran

Sri Kartini (2019:44-45) menyatakan setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Namun didalam prakteknya hal ini sangat sulit dilakukan. Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa jika tingkat pengangguran rendah masalah inflasi akan semakin tinggi. Sedangkan jika terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Artinya tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak.

Untuk melihat dampak laju inflasi dengan tingkat pengangguran, dapat digambarkan ke dalam Kurva Philips. Kurva Philips adalah pada mulanya kurva menurun sangat curam, tetapi semakin lama bertambah landai. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah tingkat pengangguran. Sebaliknya, semakin rendah tingkat inflasi, maka semakin tinggi tingkat pengangguran. Berikut ini Kurva Philips dijelaskan pada Gambar 2.3 :



Gambar 2.3

Kurva Philips

Sumber : Sri Kartini (2019:45)

Berdasarkan kurva Philips di atas, terdapat beberapa simpulan yaitu :

- Pada awalnya, tingkat inflasi sebesar nol dan pengangguran berada di tingkat pengguna tenaga kerja penuh (*full employment*).
- Pada titik A, tingkat inflasi negatif (*deflationary gap*), tingkat pengangguran lebih tinggi.
- Pada titik B, tingkat inflasi positif (*inflationary gap*), tingkat pengangguran lebih rendah. (Sri Kartini, 2019:45)

2. Dampak Inflasi terhadap Sosial

Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi. Para pelaku ekonomi dalam situasi ini tidak ingin melakukan spekulasi dalam perekonomian. Selain itu inflasi dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik.

Distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

2.1.5.4 Cara Mengatasi Inflasi

Cara menyelesaikan permasalahan inflasi dapat diselesaikan melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sasaran kebijakan moneter berfokus pada jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dan inflasi dijelaskan dalam teori kuantitas yang disampaikan oleh Irving Fisher yang mengatakan bahwa inflasi bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, karena hubungan jumlah uang beredar terhadap inflasi adalah sebanding. Dalam teori tersebut, Fisher menyatakan kenaikan jumlah uang beredar akan menstimulus terjadinya inflasi, dengan asumsi bahwa kecepatan jumlah uang beredar dan volume produksi perekonomian bersifat konstan. Fisher (dalam Gilarso, 2004) juga menjelaskan mengenai politik moneter yang mengendalikan tingkat harga dengan jumlah uang beredar (M_s) secara lebih fleksibel. Dalam hal ini uang dapat digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dalam kondisi deflasi atau inflasi. Apabila sedang dalam kondisi deflasi, maka jalan yang dapat diambil yaitu melalui penambahan

Money Supply (M_s), sebaliknya bila dalam kondisi inflasi, gejolak harga bisa diatasi atau dikendalikan dengan memperkecil M_s .

Selain dari segi jumlah uang beredar, tingkat harga juga dapat dijelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti produksi masyarakat (penawaran) dan konsumsi atau pembelanjaan masyarakat (permintaan). Uang hanya mendukung dan mewujudkan permintaan efektif masyarakat. Dalam hal ini pengaruh uang baru muncul bila tergantung dari:

- a. Berapa jumlah uang yang beredar (*supply*), dan
- b. Uang diminta dan dibutuhkan untuk apa (*demand*).

Masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah memerlukan uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi-transaksi mereka. Jumlah uang yang dipakai untuk transaksi-transaksi ini disebut dengan uang aktif. Dikatakan uang aktif karena uang itu dipakai untuk dibelanjakan sehingga uang berputar dan menggerakkan proses produksi. Dengan produksi yang terus berkembang, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan tidak menutup kemungkinan akan menciptakan kesempatan kerja yang berarti mengurangi pengangguran. (Gilarso, 2004)

2.1.6 Investasi

2.1.6.1 Pengertian Investasi

Istilah investasi atau penanaman modal memiliki beberapa pengertian, yaitu :

1. Sadono Sukirno (2016:121) mendefinisikan “Investasi sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk

membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang perlu didepresiasi.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah suatu proses pengeluaran atau pembelanjaan membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, sehingga meningkatkan hasil produk dan jasa yang tersedia baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan karakteristiknya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Investasi Publik (*Public Investment*)

Investasi publik (*public investment*) merupakan investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik ini bersifat nirlaba atau *nonprofit motive*, seperti pembangunan jalan

dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.

2. Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi swasta (*private investment*) adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan investasi dengan *profit motive*. Investasi ini dapat dilakukan oleh pihak domestik atau disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). (Noor, 2007:439-441)

2.1.6.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2002:8), investasi (PMDN) berkaitan dengan kesempatan kerja. Investasi tidak hanya dapat menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Sebagai salah satu faktor produksi, penggunaan tenaga kerja otomatis akan meningkat. Dinamika investasi mempengaruhi tingkat tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan perkembangan pembangunan yang lambat, oleh karena itu setiap

negara berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong investasi, terutama investasi swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 2007:69). Peningkatan kapasitas lapangan kerja berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran, karena peningkatan investasi akan menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.

2.1.6.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Salvatore (2014) menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing terdiri atas:

1. Investasi Portofolio (*Portfolio Investment*)

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2. Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

Investasi asing langsung meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata, misalnya seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelanjaan berbagai peralatan inventaris dan sebagainya. Keberadaan aset-aset ini, biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dan pihak investor sendiri (pemilik aset) tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya.

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa.

2.1.6.5 Peranan Investasi

Motivasi utama suatu negara menarik investasi adalah untuk melakukan eksplorasi potensi kekayaan alam dan sumber daya lain guna mempercepat pembangunan ekonomi. Fakta ini disebabkan oleh investasi, baik domestik maupun asing yang akan meningkatkan pertumbuhan teknologi, alih kepemilikan, perluasan lapangan kerja disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan. Namun dalam proses ini, harus dihindari dominasi ekonomi nasional oleh modal asing (Wiranata, 2004:12).

Menurut Sadono Sukirno (2000:367) menyatakan kegiatan investasi dapat memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut berasal dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal akibat investasi akan meningkatkan kapasitas produksi.
3. Investasi akan selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas disimpulkan bahwa investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. Serta dengan adanya investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga dapat menyerap faktor-faktor produksi baru, yaitu menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menambah informasi untuk memperkuat teori penelitiannya atau secara tidak langsung merupakan upaya menunjukkan perbandingan antara letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang dimaksud.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1.	Dwi Aprilia Putri (2016). Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2003-2014	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas yang sama yaitu Inflasi, UMP, dan Pertumbuhan Ekonomi.	Tidak menggunakan variabel bebas yaitu Investasi. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap TPT dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TPT. Serta, Inflasi, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap TPT di Jawa Timur tahun 2003-2014.	E-Jurnal Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ. Negeri Surabaya Vol. 4, No. 3 Agustus 2016, hlm. 1-8
2.	Dita Dewi Kuntiarti (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010-2015	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas yang sama yaitu Inflasi.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka. Jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015.	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Univ. Negeri Yogyakarta a Vol. 7, No. 1 Januari 2018, hlm. 1-9. ISSN: 2549-5771

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Muhammad Shun Hajji, Nugroho SBM (2013). Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas yang sama yaitu PDRB, Inflasi dan UMP.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu Angka Melek Huruf. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TPT. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TPT. UMP dan Angka Melek Huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Serta, PDRB, Inflasi, UMP dan Angka Melek Huruf secara simultan berpengaruh terhadap TPT di Provinsi Jawa Tengah 1990-2011.	Diponegoro Journal of Economics Univ. Diponegoro Vol. 2, No. 3 Agustus 2013, hlm. 36-45. ISSN: 2337-3814
4.	Hasih Pratiwi, Ardina Nilam Prawastyorini, dan Sugiyanto (2019). Analisis Data Panel pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas yang sama yaitu PDRB dan Inflasi.	Menggunakan variabel bebas yaitu Angkatan Kerja, Angka Partisipasi Kasar, Rasio Ketergantungan, UMK dan IPM. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Model <i>fixed effect</i> sebagai model terbaik untuk memodelkan TPT Kab/Kota di Pulau Jawa. Angkatan kerja, rasio ketergantungan, berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT, IPM berpengaruh positif signifikan terhadap TPT. Sedangkan, angka partisipasi kasar, jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan, dan produk domestik regional bruto, UMK dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TPT Kab/Kota di Pulau Jawa.	Jurnal Matematika dan Statistika dan Komputasi Univ. Hasanuddin Vol. 16, No. 1 JMSK, July 2019, hlm. 51-57. ISSN: 2614-8811
5.	Syurifto Prawira (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi.	Menggunakan variabel bebas yaitu Tingkat Pendidikan. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TPT. UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi, UMP dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.	Jurnal Ecogen Univ. Negeri Padang Vol. 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 162-168. ISSN: 2654-8429

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Aboy Kurniawan, Adnan Haris Musa, Rachmad Budi Suharto (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas Inflasi dan Investasi.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu Jumlah Penduduk. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Inflasi berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Serta, investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur.	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Univ. Mulawarman Samarinda Vol. 19, No. 2 2017, hlm. 131-136. ISSN Online: 2528-150X
7.	Mokhammad Bisri Amin (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2005-2013	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi.	Tidak menggunakan variabel bebas yaitu Investasi. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Serta, secara bersama-sama upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap TPT di provinsi Jawa Timur tahun 2005-2013.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univ. Brawijaya, Malang Vol. 4, No. 2, Semester Genap 2015/2016, hlm. 1-19.
8.	Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti, Ni Luh Karmini (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran Terbuka dan variabel bebas Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi.	Tidak menggunakan variabel bebas yaitu Investasi. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Tingkat inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univ. Udayana, Bali Vol. 3, No. 10 Oktober 2014, hlm. 460-466. ISSN: 2303-0178

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Ni Wayan Mentari dan I Nyoman Mahaendra Yasa (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali	Menggunakan variabel terikat Tingkat Pengangguran dan variabel bebas yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Investasi.	Menggunakan variabel bebas yaitu tingkat Upah Kab/Kota. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, tingkat upah dan jumlah investasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui variabel intervening jumlah investasi.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univ. Udayana Bali Vol. 5, No. 6, Juni 2016, (pp. 652-728) hlm. 692-712. ISSN: 2303-0178
10.	Nur Fitri Yanti, Haerul Anam, dan Harnida Wahyuni Adda (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014	Menggunakan variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran dan variabel bebas yang sama yaitu PDRB, Inflasi, dan Investasi.	Tidak menggunakan variabel bebas yaitu UMP. Serta, dalam wilayah dan tahun penelitian yang berbeda.	Inflasi, PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Inflasi, investasi, PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di wilayah Sulawesi periode 2010-2014.	Katalogis Univ. Taduloka Palu Vol. 5, No. 4, 2017, hlm. 138-149. ISSN: 2302-2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengangguran masih menjadi masalah yang kompleks di negara berkembang Indonesia, dapat dilihat dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi dan investasi.

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

N.Gregory Mankiw (2006) menyatakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan oleh Hukum Okun yang dipublikasikan oleh ekonom Arthur Okun. Hukum Okun menjelaskan bahwa untuk setiap 2% peningkatan GDP, tingkat pengangguran akan menurun 1%. Artinya ada korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Arthur Okun menjelaskan bahwa jika perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*), maka hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta tingkat pengangguran minimum akan tercapai. Artinya semua faktor produksi, terutama tenaga kerja akan terpakai semuanya. Adapun rumus Okun adalah :

$$\frac{\partial L}{\partial Q} = C$$

Dimana :

L = Kesempatan kerja

Q = *Output*

C = Hubungan proposional L dan Q

Ketika *output* meningkat atau bertambah, C juga akan meningkat. Ketika C meningkat maka akan meningkatkan L, sehingga peningkatan kesempatan kerja (L) akan mengurangi pengangguran.

Mokhammad Bisri Amin (2016) menyatakan pertumbuhan ekonomi sangat penting diperhatikan mengingat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat perekonomian suatu negara atau

daerah. Pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan pengangguran. Dalam penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini berarti pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengalami peningkatan maka hal ini akan meningkatkan pendapatan suatu wilayah tersebut serta banyak terbuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2.3.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh pekerja di sebuah perusahaan, yang berperan untuk pemenuhan kebutuhan individu pekerja maupun keluarga sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Upah Minimum Provinsi yang diberikan perusahaan kepada karyawan berbeda-beda tergantung tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Dalam suatu kurva Philips yang menerangkan antara hubungan kenaikan upah dan pengangguran. Kesimpulan dari kurva tersebut adalah terdapat satu hubungan yang negatif diantara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi maka tingkat upah rendah dan sebaliknya jika pengangguran rendah maka tingkat upah tinggi (Sukirno, 2016:245-246).

Menurut Dita Dewi Kuntiarti (2018:7), menyatakan kenaikan upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka. Hal tersebut berarti kenaikan upah minimum setiap tahunnya dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka sebab kenaikan upah minimum dirasakan sudah mencukupi

kebutuhan oleh para pekerja sehingga dengan kenaikan upah minimum tersebut penganggur tidak lagi pilih-pilih dalam mencari pekerjaan dan langsung menerima tawaran pekerjaan yang ada. Hal tersebut akan menyebabkan pengangguran menjadi berkurang.

2.3.3 Hubungan Inflasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Inflasi mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dari kajian A.W Phillips mengenai hubungan inflasi dengan pengangguran dikemukakan bahwa apabila tingkat pengangguran semakin tinggi maka tingkat inflasi akan semakin rendah begitupula sebaliknya jika tingkat pengangguran rendah maka tingkat inflasi akan semakin tinggi.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang. (Nopirin, 2016)

Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti, dkk (2014) menyatakan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini berarti Dengan meningkatnya harga (inflasi) maka produsen untuk memenuhi permintaan

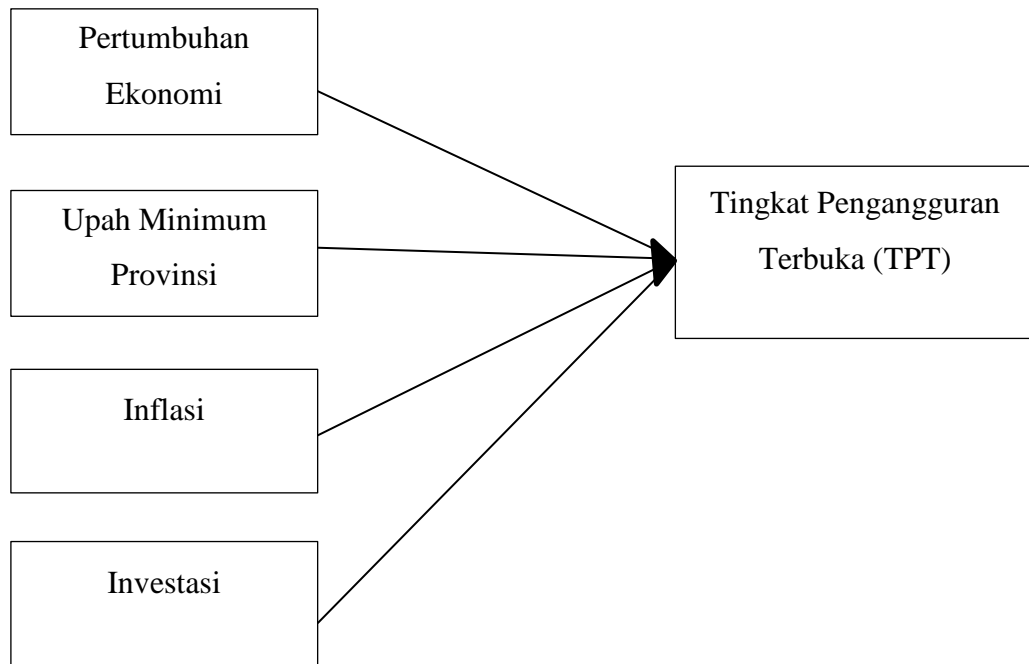
tersebut akan menaikkan kapasitas produksi dengan menambahkan tenaga kerja, sehingga pengangguran berkurang.

2.3.4 Hubungan Investasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Investasi mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Menurut teori Harrod Domar (dalam Mulyadi, 2003:9-10), secara teori investasi tidak hanya dapat menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Artinya untuk memperoleh kesempatan kerja yang cukup maka kapasitas produksi yang lebih besar akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar, karena investasi merupakan peningkatan faktor produksi, salah satunya tenaga kerja. Dengan asumsi *full employment*, maka seluruh perekonomian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja semakin meningkat dan mengurangi pengangguran. Investasi yang digunakan adalah investasi total, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Aboy Kurniawan, dkk (2017) menyatakan investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut berarti kenaikan investasi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kenaikan investasi akan menciptakan permintaan dan memperbesar kapasitas produksi. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka dapat menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini :



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Muri Yusuf (2014:131) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel. Kebenaran dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah.” Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hasil pengujian ini

akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan permasalahan yang diuji peneliti yaitu masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa.

Penyusunan hipotesis dengan benar berlandaskan teori-teori yang ada akan mengarahkan peneliti untuk lebih fokus dan terarah, baik ditinjau dari informasi yang akan dikumpulkan maupun teknik analisis yang akan digunakan untuk pengolahan data. Dari uraian permasalahan yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2009-2019.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi dan investasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2009-2019.